

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI
PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : AULIDA HARISA
NPM : 1405170321
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : AULIDA HARISA
N P M : 1405170321
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**
Dinyatakan : *(B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


Drs. MARNOKO, M.Si

Penguji II

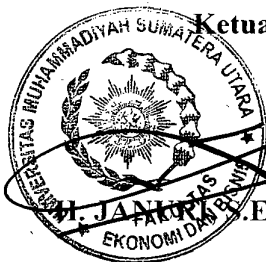

YUSWAR EFFENDY, S.E., M.M. M.Si

Pembimbing


Dr. IRFAN, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua




H. JAKRIANSYAH, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : AULIDA HARISA
N.P.M : 1405170321
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : **PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI
PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Penbimbing Skripsi


Dr. IRFAN., SE., MM

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU




H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : AULIDA HARISA
N.P.M : 1405170321
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH MELALUI PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab. II		
	Deskripsi dan Analisis dan Pembahasan	✓	
	Bab. V		
	- Kesimpulan	✓	
	Abstrak	✓	
	Seleksi Bibliografi	✓	
	sec: Sidang Ujian Akhir	✓	

Dosen Pembimbing

7/3/18
(Dr. IRFAN, SE, MM)

Medan, 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aulida Harisa
NPM : 1405170321
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : **Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui
Program Kemitraan Bina Lingkungan Pada PT.
Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Pembuat Pernyataan



Aulida Harisa

ABSTRAK

Aulida Harisa, NPM 1405170321, Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan. Skripsi.

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman pelaku Usaha Kecil Menengah dalam menyusun laporan keuangan.

Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari pelaku Usaha Kecil Menengah dan Program Kemitraan Bina Lingkungan. Data penelitian penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara , dan data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dalam pelaporan keuangan masih banyak yang tidak mampu membuat dan memahaminya dan bagi pelaku usaha pelaporan keuangan menyulitkan bagi mereka, walaupun kewajiban hal tersebut ada pada surat perjanjian yang telah ditetapkan oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan .

Kata Kunci : *Pemberdayaan UKM, Program Kemitraan Bina Lingkungan, Pemahaman Pelaporan keuangan UKM*

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Wr.wb

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis ucapkan untuk setiap berkah, rahmat, karunia, dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**.

Dalam mempersiapkan skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ayahanda Suharto, Ibunda Helmiati, dan Adik Fitra Akbar, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya, do’a dan dorongan moril maupun materil kepada penulis yang telah menyemangati dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Serta penulis juga berterima kasih kepada pihak – pihak yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE.,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
6. Ibu Zulia Hanum, SE.,M.,Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Irfan, SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu, memberi arahan dan masukkan kepada penulis sehingga skripsi penelitian ini dapat tersusun dengan baik.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku Staff Pengajar yang banyak membekali penulis dengan berbagai pengetahuan.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
11. Fitri Erliana dan Vivi Alvida selaku Sahabat penulis yang telah membantu dan memberi masukkan serta semangat.

12. Teman-teman seperjuangan kelas A Akuntansi Sore yang telah membantu dan memberikan dukungan. Terutama stambuk 2014 Ekonomi Akuntansi. Terima kasih atas dukungannya.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya dan menambah wawasan yang akan datang khususnya mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018
Penulis

AULIDA HARISA
NPM:1405170321

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori	7
1. Pemberdayaan	7
a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	7
b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat	14
c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	15
d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	17
2. Usaha Kecil Menengah.....	17
a. Pengertian Usaha Kecil dan Usaha Menengah.....	17
b. Peran dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah	18
c. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah ..	19
d. Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan	22
3. Program Kemitraan Bina Lingkungan.....	31
a. Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	32
b. Prinsip-Prinsip Kemitraan	33
c. Tujuan Kemitraan	34
d. Pola-Pola kemitraan atau jenis kemitraan usaha	35
4. Laporan Keuangan.....	23
a. Tujuan Laporan keuangan.....	25
b. Auntansi	26
c. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Berpikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Defenisi Operasional Variabel	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum PT.Perkebunan Nusantara III Medan.....	39
2. Deskripsi Data	39
B. Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian	36
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	34
Gambar IV.1 Mekanisme Penyaluran Dana	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peranan sektor industri yang sangat mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini akan memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Kehidupan perekonomian masyarakat pada umumnya ditandai dengan permodalan yang lemah. Hal ini disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang cenderung monoton. Oleh karena itu sumber permodalan merupakan sumber utama dalam mendukung tingkat perkembangan produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Keterbatasan modal berbanding lurus dengan aktivitas usaha masyarakat dalam hal meningkatkan usaha yang telah mereka jalankan dengan keterbatasan dana yang dimiliki, sementara pada kenyataannya sumber modal yang diperoleh untuk mendukung kegiatan usaha tersebut terkadang sulit untuk diperoleh. Dalam pembangunan dan menumbuhkan UKM, diperlukan pengoptimalan pengembangan masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

Pemerintah memang telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan nasional, akan tetapi hal ini bukan berarti dana yang dialokasikan

untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran nasional telah mencukupi karena pada kenyataannya alokasi belanja Negara untuk sektor kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan masih sedikit. Faktor ini kemudian menjadi salah satu penyebab program pemberantasan kemiskinan di negeri ini tidak selesai sampai sekarang. Oleh karena itu diperlukan peran dari masyarakat, khususnya sektor badan usaha, dalam upaya membantu pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Hal ini sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi. Pada sistem ini pemerintah dan seluruh rakyat, baik individual maupun badan usaha, aktif dalam usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Perekonomian Indonesia di dukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta dan koperasi. Perusahaan merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah dan masyarakat. Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, tentu juga turut menjalankan agenda pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu aktivitas perusahaan harus bersinergi dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan yang merupakan kompensasi dari resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Perkembangan paradigma dan pemikiran dalam dunia usaha menyebabkan munculnya ide etika dalam bisnis yang melihat perusahaan tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan atau memenuhi tanggung jawab hukum sebagai suatu

entitas bisnis saja. namun lebih jauh dilihat sebagai suatu usaha yang bermartabat (etika bisnis) selain itu etika bisnis juga ditujukan untuk meminimalisasi semua permasalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, seperti terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, kasus hubungan industrial dan hak-hak pekerja, kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat, kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan martabat. Menyikapi kenyataan yang terjadi, perlu adanya sasaran dalam

pembangunan ekonomi yaitu mewujudkan sistem ekonomi yang selaras dengan ekologi (juga sosial), dengan diadakannya kegiatan ataupun program ekonomi yang bersifat sosial. Dalam hal ini pemerintah melalui perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara merintis suatu program yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu meningkatkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Program tersebut bernama PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Salah satunya terdapat di Perusahaan BUMN yaitu di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan berkantor pusat di Medan di jalan Sei Batanghari, Sunggal.

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) pada dasarnya adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar, khususnya untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dari laba yang disisihkan, serta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Melalui PKBL, perusahaan merasa terpanggil untuk turut memberdayakan masyarakat sekitar dengan mendorong kegiatan produktif dan perluasan kesempatan berusaha sehingga dapat diperoleh kemajuan bersama. Pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan menengah oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan selaku pemegang saham BUMN No. 232/KMK./1989 tanggal 14 Oktober 1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama program Pegelkop (Pembina pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.061/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembina Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan

perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan – peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN No.Kep. 236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 nama program diganti menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (disingkat PKBL) sampai sekarang. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Program Kemitraan ini memberikan pinjaman modal kerja kepada masyarakat dengan jumlah bunga yang relatif kecil yaitu 3%. Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tidak hanya memberikan pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi dengan suku bunga, persyaratan dan jaminan pinjaman yang ringan. Tetapi perusahaan juga memberikan bantuan pembinaan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pemasaran yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Wilayah Medan adalah salah satu daerah yang mendapatkan bantuan pinjaman modal dari Program Kemitraan. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menyalurkan Program Kemitraan sebesar Rp 218.053.552.113 dan Bina Lingkungan sebesar Rp 153.956.706.620 s/d triwulan I tahun 2016. Adapun realisasi penyaluran Program Kemitraan tahun 2017 sampai engan Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp 9.515.000.000, kepada 224 UKM, sehingga total penyaluran dana sejak digulirkannya Program Kemitraan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp 248.878.552.113 kepada 7549 UKM. Kemudian realisasi penyaluran Tahun 2017 sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 6.565.588.282 sehingga total penyaluran Program Bina Lingkungan sampai

dengan Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp 170.742.788.587. Program Kemitraan tidak hanya melakukan peminjaman, tetapi juga memberikan bantuan pembinaan dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan promosi yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pada tahun 2016 program kemitraan telah memberikan pembinaan kepada para mitra binaan Wilayah Medan. Bentuk pembinaan yang telah diberikan oleh Program Kemitraan kepada mitra binaan yaitu : pelatihan, penyuluhan, dan juga pemasaran. Beban pembinaan tersebut bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Sebelum adanya Program Kemitraan mereka menjalankan usaha hanya berskala kecil saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari modal yang mereka miliki, setelah adanya Program Kemitraan ini maka sekarang usaha mereka telah berkembang. Artinya, dari yang dahulunya mereka punya usaha yang kecil, sekarang dengan adanya pinjaman dari Program Kemitraan maka usaha mereka menjadi berkembang. Semenjak adanya Program Kemitraan, masyarakat Wilayah Medan telah merasakan manfaatnya, karena dengan adanya Program tersebut sangat membantu mereka dalam menjalankan usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang. Terutama sekali dapat meningkatkan usaha yang telah dijalankan sekaligus meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka.

Akuntansi Sosial dan lingkungan menjadi perhatian perusahaan karena perusahaan berusaha memenuhi harapan pihak-pihak terkait dalam upaya mendapatkan legitimasi. Stakeholder teori menjelaskan bahwa perusahaan akan memenuhi harapan stakeholder perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya untuk menyampaikan laporan yang menyajikan informasi mengenai upaya

perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Akuntansi sosial dan lingkungan yang dikenal selama ini berbentuk CSR.

Corporate Social Responsibility adalah program kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha PTPN III melalui pemanfaatan dana perusahaan yang tertampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pengentasan masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan mendorong kesejahteraan dan perbaikan lingkungan di Indonesia adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada prinsipnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud dari *good corporate governance*. Dalam hal ini CSR diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam pengertian ini CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan yang ditujukan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pihak yang terkait (stakeholder) oleh perusahaan tersebut, terutama masyarakat di sekitar perusahaan dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Pada PT. Pekebunan Nusantara III (Persero) Medan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu menurut UU NO. 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas BAB V. Peraturan

pemerintah tentang CSR telah diterbitkan tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Nomor 47 tahun 2012).

Menurut (Warsono 2010) menyatakan dengan akuntansi yang memadai maka UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan dan menghitung pajak.

Pada pemberdayaan usaha kecil menengah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan PTPN III (Persero) Medan terdapat fenomena masalah yang penulis temui yaitu, Kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil menengah dalam menyusun laporan keuangan sehingga PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sulit dalam melihat perkembangan UKM pada saat observasi serta penagihan piutang karena tidak ada bukti tertulis yang akurat untuk memastikan usaha para UKM telah mengalami perkembangan dalam usahanya. Hal ini bertentangan dengan teori menurut (Fahmi 2011 hal 28 dalam Riswan dan Yolanda 2014 hal 95) yang menyatakan bahwa laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan .para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang

dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul “ **Pemberdayaan Usaha Kecil menengah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan** ”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dalam menyusun laporan keuangan pelaku UKM dalam membuat laporan keuangan sehingga PTPN III (Persero) Medan sulit dalam penagihan karena tidak ada bukti tertulis yang akurat dalam perkembangan pelaku UKM setelah diberi modal.
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha UKM pada saat PTPN III melakukan binaan terhadap para calon binaan PTPN III, sehingga menyulitkan pelaku usaha UKM dalam pemahaman penyusunan laporan keuangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman pelaku Usaha Kecil Menengah dalam menyusun laporan keuangan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman pelaku Usaha Kecil Menengah dalam menyusun laporan keuangan.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membacanya. Adapun manfaat yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menganalisis laporan keuangan serta memberikan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ekonomi Akuntansi.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi Perusahaan atau Masyarakat

Sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi pihak perusahaan atau masyarakat dalam mengevaluasi kinerja untuk menetapkan kebijakan selanjutnya dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah sehingga tercapai tujuan bersama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pemberdayaan

“Pengertian “daya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Kemunculan konsep pemberdayaan (empowerment) didasari oleh gagasan yang menetapkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri (KBBI dalam Satori,dkk)”.

“mengetahui pentingnya usaha kecil dan menengah maka perkembangan terhadap usaha kecil dan menengah adalah penting dilakukan. Adapun peningkatan usaha kecil menengah dapat dilakukan dengan pemberdayaan terhadap pelaku usahanya. Dalam pemberdayaan terjadi proses dimana masyarakat didorong dan diyakinkan untuk memperoleh keterampilan, kemampuan, dan kreativitas (Edi Suharto, 2005, hal.57 dalam Satori,dkk)”.

“Pemberdayaan adalah upaya menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk mengambil bagian serta mempengaruhi masyarakat mereka. (Asep Jahidin, 2005, hal. 63 dalam Satori,dkk).”

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat (Moch. Rochjadi Hafiluddin,dkk 2014).”

a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2014, hal. 202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- 1) Perbaikan Kelembagaan (Better Institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 2) Perbaikan Usaha (Better Business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 3) Perbaikan pendapatan (Better Income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 4) Perbaikan Lingkungan (Better Environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 6) Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

b. Prinsip – Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Najiati dkk, 2005 hal 54). Adapun penjelasan terhadap prinsip - prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan dan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan. Sehingga terjadi proses saling belajar.
- 2) Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- 3) Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.

- 4) Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, direct action, dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006) :

- 1) Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
- 2) Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
- 3) Strategi transformative. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka waktu panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Tahap persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bias dilakukan oleh community woker, dan kedua

penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara nondirektif.

- 2) Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- 3) Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agen) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap memformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- 5) Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
- 6) Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

- 7) Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

2. Usaha Kecil Menengah

a. Pengertian Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Badan pusat statistik memberikan definisi UKM berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan mitra usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

b. Peran dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

- 1) Penyediaan barang dan jasa.

- 2) Penyerapan tenaga kerja.
- 3) Pemerataan pendapatan.
- 4) Sebagai nilai tambah bagi produk daerah.
- 5) Peningkatan taraf hidup masyarakat.

Bentuk pembinaan Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan sebagai sarana, bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah :

- 1) Sistem kemitraan usaha.
- 2) Dana pembinaan BUMN dari keuntungan bersih .
- 3) Pembentukan lembaga penjamin kredit usah kecil.
- 4) Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil.
- 5) Kredit tanpa agunan (kedit kelayakan usaha) Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil.
- 6) Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.
- 7) Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk mengembangkan usaha kecil.

c. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah

Pada kenyataannya, Usaha Kecil dan Menengah mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi Usaha Kecil di Indonesia mampu berperan sebagai buffer (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. (Harimurti, 2009), secara umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan antara lain :

- 1) Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi).
- 2) Perusahaan keluarga, dimana pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- 3) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
- 4) Resiko usaha menjadi beban pemilik.
- 5) Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan premature .
- 6) Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.

d. Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan

Upaya untuk meningkatkan wirauasaha, khususnya pengembangan usaha kecil di Indonesia telah lama dilakukan barbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Berbagai kebijakan maupun bantuan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha-usaha kecil ini. Keseriusan pemerintah untuk menangani usaha kecil ini terlihat dengan dibentuknya menteri koperasi dan pemberdayaan Usaha Kecil dalam kabinet pembangunan VI.

Peranan usaha kecil terhadap pembangunan ekonomi sebuah Negara tidaklah kecil. Di AS, Jerman, Jepang serta beberapa Negara maju lainnya, sejumlah usaha besar tumbuh melalui pembagian kerja dengan ribuan jenis usaha kecil, yang memproduksi bagian-bagian produksi yang dibutuhkan oleh pengusaha besar tersebut. Peranan usaha-usaha kecil di Indonesia juga tidaklah kecil. Bagi Indonesia, secara politis usaha kecil berperan dalam pemerataan

pendapatan ekonomi masyarakat, serta mampu menjadi tempat yang berfungsi untuk mengatasi masalah pengangguran yang kian merebak.

3. Program Kemitraan Bina Lingkungan

a. Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program kemitraan adalah program untuk peningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari perusahaan.

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Program kemitraan diberikan untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi penjualan. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 tentang Sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pasal 8 ayat 1 :

- 1) Dana program kemitraan bersumber dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/menteri pengesahan laporan tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan persentase tertentu dari laba bersih.
- 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari program kemitraan.
- 3) Hasil bunga deposito atau jasa giro dari dana program kemitraan dan program bina lingkungan yang ditempatkan.
- 4) Sumber lain yang sah.

b. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya, Wibisono (2007,hal 103) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

- 1) Kesetaraan dan keseimbangan (equity). Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
- 2) Transparansi. Diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga anatr mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.
- 3) Saling menguntungkan. Suatu mitra harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

c. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “win-win solution partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan kultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional.
- 5) Memperluas kesempatan kerja.
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

d. Pola-Pola Kemitraan atau jenis kemitraan usaha

- 1) Inti-plasma. Berfungsi melakukan pembinaan, penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, dan pemasaran, sedangkan plasma melakukan fungsi produksi.
- 2) Sub kontak. Pola ini merujuk pada usaha kecil memproduksi komponen yang diperluas oleh usaha menengah dan besar sebagai bagian dari produksinya. Sedangkan usaha menengah dan besar berfungsi melakukan pembelian komponen dari usaha kecil untuk keperluan produksinya. Pola ini didorong oleh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan untuk menyelamatkan usaha kecil sebagai mitra bagian yang tidak terpisahkan, pola ini lebih sederhana dan mudah diterapkan bila didukung oleh suatu aturan yang jelas dari pemerintah.
- 3) Dagang umum. Pada pola ini usaha menengah dan besar memasarkan hasil produksi usaha atau usaha kecil sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah dan besar. Pola ini dilakukan dalam dunia bisnis atas dasar saling menguntungkan.
- 4) Waralaba pemberian. Waralaba memberikan hak penguasaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba

dengan bantuan bimbingan manajemen. Pada prinsipnya pola ini banyak digunakan dalam dunia bisnis terutama bagi merk-merk terkenal dan dikonsumsi banyak orang. Hampir setiap celah bisnis dapat menggunakan pola ini seperti *fast food*, industri kimia, obat-obatan dan industri jasa lainnya. Pola ini secara bisnis lebih menjamin keberhasilan namun dalam jangka panjang pola ini dapat menguras devisa Negara sangatlah besar karena royalti yang akan dibayar secara totalitas sangatlah besar.

- 5) Keagenan. Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dan usaha menengah dan besar sebagai mitranya.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (SAK 2002 hal 4 dalam Harahap Yenni R).

“Laporan keuangan merupakan suatu alat gambar kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu serta pertanggungjawaban pada manajemen serta yang terpenting secara mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan dapat membantu dalam menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha khususnya UKM. Sehingga untuk mencapai kinerja usaha secara berhasil salah satu cara adalah dengan melakukan penyimpanan catatan bisnis, pengelolaan keuangan (Kementerian Pendidikan, 2010, hal.9 dalam H Yenni R).”

“ Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca , laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang berguna untu memberikan informasi mengenai posisi laporan keuangan. (Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 2012 hal.52 dalam Elisabeth,dkk)”.

Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni :

1) Kegiatan akuntansi

Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2) Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalm penilaian dan pngambilan keputsan mengenai kesatuan yang bersangkutan.

a. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan yang dicanangkan dalam APB No.4 secara umum dinyatakan tujuan dasar keuangan dan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang keuangan perusahaan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi.

“Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004, hal.548 dalam Hermon dan Elisabeth).”

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (Hadri Mulya, 2013 hal. 14).”

Untuk memenuhi tujuan diatas tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi tentang suatu entitas yang terdiri dari: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam prediksi arus kas masa depan dan kinerja entitas.

b. Akuntansi

Menurut Kieso (2002), akuntansi didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi : (1) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan.

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren, 2006 hal.10 dalam Elisabeth, dkk).

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (American Accounting Association dalam Soemarso S.R, 2009 hal 3).

B. Penelitian Terdahulu

Unang dan Maulana (2012) dengan judul Kesejahteraan UMKM pendekatan corporate social responsibility (studi kasus PTPN VII). Hasil penelitian hasil pengujian hipotesis secara parsial, kesejahteraan UMKM hanya menunjukkan korelasi dan signifikan yang bermakna dengan variable CSR issue. Sedangkan variabel CSR goal dan corporate Relation program tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Secara simultan, hasil uji regresi linear berganda menunjukkan variabel CSR goal, CSR issue dan Corporate Relation Program tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan UMKM.

Satori,dkk (2011) dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui Program CSR PT. Indocement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin batik tulis Ciwaringin mendapat manfaat pemberdayaan UMKM melalui permodalan, sarana prasarana, dukungan pemasaran, dukungan non materil, serta selalu meningkatkan pengrajin tentang tujuan utama pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, dan dampak pemberdayaan memiliki positive negative.

Elisabeth,dkk (2012) dengan judul Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . hasil penelitian pelaporan akuntansi dilakukan hanya sebatas untuk kepentingan pengelolaan usaha sebagian besar laporan yang di buat pengelola usaha adalah laporan penjualan, pembelian,persediaan, dan laporan gaji.

C. Kerangka Berpikir

Akuntansi Sosial sering juga disebut Akuntansi Lingkungan ataupun Akuntansi Sosial Ekonomi. Salah satu yang ada pada PT.Perkebunan Nusantara adalah program *Corporate Social Responsibility* yang merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan oleh PTPN III (Persero) Medan sebagai BUMN pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UKM sehingga dapat berkembang dan memiliki daya saing yang baik dan diharapkan dapat beralih pada usaha menengah bagi usaha kecil, usaha besar bagi usaha menengah. Pada dasarnya pelaksanaan program kemitraan tidak hanya terfokus pada pemberian pinjaman saja, melainkan disertai dengan pembinaan UKM. Selain itu, pelaksanaan program kemitraan seharusnya dilakukan secara merata dengan melihat pertimbangan-pertimbangan seperti peluang UKM itu sendiri untuk maju, tanpa melihat faktor-faktor lain yang bersifat individu.

Pelaksanaan sistem prosedur dalam hal ini pada program kemitraan bina lingkungan baik dalam hal penyaluran dana bergulir maupun pada tahap pembinaan seringkali melenceng dari dasar sistem, prosedur bahkan tujuan pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh faktor keprilakuan manusia dalam melaksanakan sistem maupun prosedur itu sendiri.

Pada dasarnya. Sukses tidaknya pelaksanaan PKBL dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan sistem dan prosedurnya. Penerapan sistem dan juga

prosedur penyaluran dana bergulir dan proses pembinaan dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap kualitas UKM.

Maka berdasarkan teori, penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan pengumpulan data, klasifikasi data dan analisa data sehingga memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel, baik satu variabel atau lebih berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti. Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemberdayaan UKM melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan pada PTPN III (Persero) Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak berbentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk menjawab penelitian bersumber dari observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Interview (wawancara), yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan dan para pelaku Usaha Kecil Menengah yang terlibat.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan data dari para Usaha Kecil Menengah dan PKBL.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisis.

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
3. Menguraikan komponen pemrosesan data pelaporan keuangan oleh para pelaku Usaha Kecil Menengah.
4. Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Binaan PKBL.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara III Medan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia 08 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996 dalam rangka restrukturasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemerintah telah melakukan realokasi pengolahan areal perkebunan dibawah BUMN perkebunan, dimana PT. Perkebunan III,IV,V telah dinyatakan bubar dan sejak tanggal tersebut digabung kedalam perusahaan baru yaitu PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), walaupun substansiyinyah masih merupakan usaha sebelumnya, dengan perkebunan dalam struktur ekuisitas (jumlah laba dan saldo laba) dan penambahan serta pengurangan beberapa asset dan kewajiban .

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku BUMN Perkebunan yang bergerak di Core Business Bidang Tanaman Perkebunan yang wilayah kerjanya berada di Sumatera Utara, juga merupakan salah satu BUMN Pembina yang melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/7/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai rasa Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat (Stakeholder) yang berada disekitar wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan SE-04/MBU.S/2007 tentang penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Unit Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) selanjutnya disebut PKBL didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen) Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Keduanyatas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina LingkunganBadan Usaha Milik Negara.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) melaksanakan program kemitraan (PK) dengan Usaha Kecil dan Koperasi sejak tahun 1992 dan pelaksanaan Program Bina Lingkungan sejak tahun 2000, dengan suatu konsep pembinaan terpadu dan berkesinambungan yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan lembaga/ instansi terkait yang berkompeten dibidangnya.

Didalam pelaksanaannya PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) menyisihkan maksimum 4% dari laba bersih Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi layak kredit dan mandiri, serta untuk Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di Wilayah Usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah salah satu BUMN yang bergerak pada Core Business bidang Tanaman Perkebunan di wilayah Sumatera Utara dengan total Areal pembudidayaan seluas 141.809,44 Ha yang terdiri dari 72% Tanaman Kelapa Sawit dan 28% tanaman karet. Disamping mengelola kedua jenis tanaman tersebut diatas PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) juga melaksanakan PKBL.

Guna efektivitas pengelolaan PKBL, direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui Surat Keputusan No.:III.12/KPTS/03/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Struktur Organisasi, Sasaran Tugas Organisasi dan Proses Bisnis PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah membentuk satu bagian yang khusus mengelola kegiatan pembinaan tersebut yaitu Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang saat ini berada dibawah SEVP dan Umum dengan susunan sebagai berikut:

- a. SEVP Bidang SDM & Umum
- b. Kepala Bagian
- c. Kepala Urusan Perencanaan & Pembinaan
- d. Kepala Urusan Pembukuan, Keuangan/Admi Umum

- e. Staf Urusan Keuangan
- f. Staf Urusan Perencanaan
- g. Staf Urusan Pembinaan
- h. Krani

2. Deskripsi Data

a. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Pada awalnya nama program untuk memberi pinjaman modal dari laba perusahaan disebut Pegelkop (Pengembangan Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi) Tahun 1989-1994 menurut SK Menkeu. Selaku pemegang saham BUMN No. 232/KMK/1989 Tanggal 14 Oktober 1989. PUKK (Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi) Tahun 1994-2003 Menurut SK Menkeu No.316/KMK/061/1994. Kemudian PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun 2003-sekarang dan peraturan tersebut sampai lima kali mengalami pergantian. Yaitu Peraturan Menurut SK/Peraturan Menteri BUMN:Pertama No. Kep.236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003, kedua No.PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007, ketiga No.PER-08/MBU/2013 Tanggal 10 September 2013, keempat No.Per-07/MBU/05/2015 Tanggal 22 Mei 2015, dan terakhir No.PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 03 Juli 2015 dan berlaku sampai sekarang.

Program Kemitraan merupakan program untuk pningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari perusahaan, Program Bina Lingkungan merupakan

program pemberdayaan kondisi sosial. Masyarakat melalui pemanfaatan dana dari perusahaan. Program kemitraan diberikan untuk membiayai modal kerja dan pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.

Menurut peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 Tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dalam Pasal 8 Ayat 1. Sumber dana Program Kemitraan Bina Lingkungan merupakan dana program kemitraan bersumber dari penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri Pengesahan laporan tahunan BUMN pembina maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan persentase tertentu dari laba bersih, jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari program kemitraan, hasil bunga deposito atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ditempatkan dan sumber lain yang sah.

Syarat-syarat menjadi mitra binaan pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000, milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfalsifikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi, mempunyai potensi dan prospek usaha

untuk dikembangkan, telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun, belum memenuhi persyaratan perbankan.

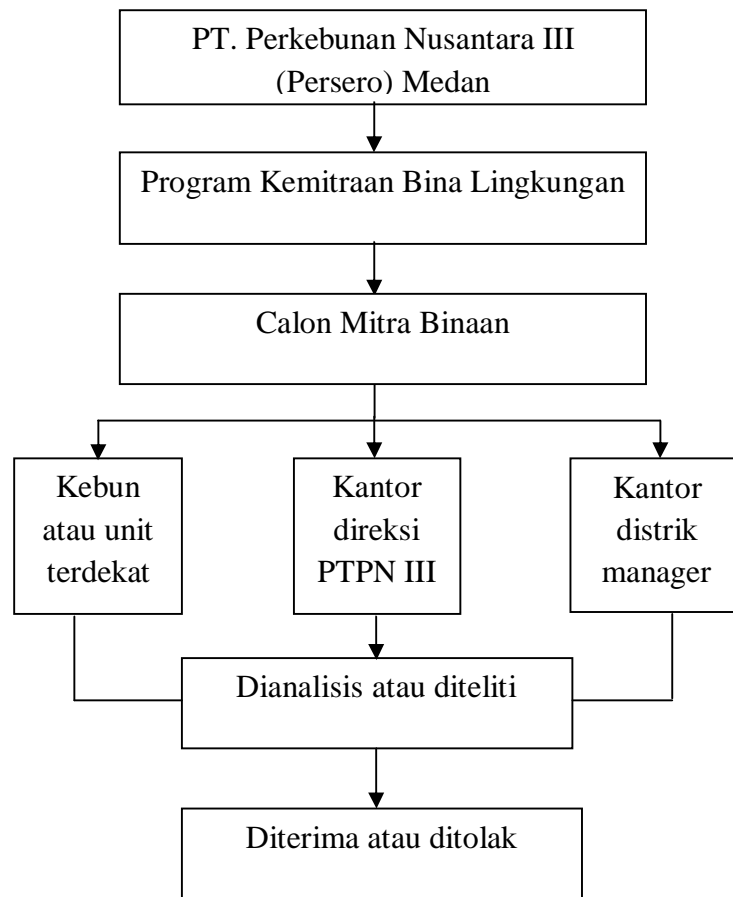
Calon mitra binaan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir aplikasi permohonan pinjaman modal kerja (AP2MK) dengan memuat data data yaitu nama dan alamat unit usaha, nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha, bukti identitas diri pemilik/pengurus, bidang usaha, izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang, perkembangan usaha atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha, rencana usaha dan kebutuhan dana, photo usaha, agunan atau jaminan, rekening tabungan bank, surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN pembina lain.

Strategi penyaluran Program Kemitraan agar tepat sasaran dibutuhkan peran aktif dari distrik/kebu/unit dalam menetapkan calon mitra binaan di wilayah masing-masing secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun tanggung jawabnya yaitu menerima dan mengidentifikasi kesesuaian proposal dari masyarakat/stakeholders, distrik melakukan komplasi proposal dengan memperhatikan dokumen SIA serta mengirimkannya ke kantor direksi, distrik dan bagian PKBL bersama-sama melakukan survei lapangan, bagian PKBL melakukan proses penyaluran melalui transfer bank ke rekening mitra binaan, distrik dengan bagian PKBL bersama-sama melakukan penagihan cicilan pinjaman mitra binaan.

Kewajiban mitra binaan melaksanakan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh perusahaan, membayar pinjaman secara tepat waktu ssesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan cara menyetor atau mentransfer ke rekening atas nama PTPN-III/dana PUKK, menyetor langsung

ke bagian PKBL PTPN III Jl. Sei Batang Hari No.2 Medan, atau ditagih langsung oleh petugas Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan, mitra juga wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodic pada perusahaan, serta wajib membuat pembukuan/ pencatatan kegiatan usaha dengan tertib.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, penulis menyimpulkan mekanisme penyaluran dana bergulir dari PT. Perkebunan Nusantara III kepada Mitra Binaan adalah sebagai berikut :



Gambar IV.1
Mekanisme Penyaluran Dana

b. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Kecil Menengah dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Mitra Binaan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki mendapat diberi binaan serta pelatihan, dalam hal ini mitra binaan diwajibkan untuk membuat pelaporan keuangan agar perusahaan atau pihak Program Kemitraan bina Lingkungan dapat melihat sejauh mana perkembangan usaha mereka sebelum dan setelah mendapat pinjaman dana dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dalam hal ini, mitra binaan lemah dan bisa dikatakan tidak produktif dalam membuat laporan keuangan usaha mereka. Dapat dilihat dari pembukuan ataupun pelaporan yang mereka lakukan tidak sedetail seperti yang telah dianjurkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. PT. Perkebunan Nusantara III menginginkan pelaporan salah satunya pencatatan laba atau rugi usaha seperti penjualan, pembelian, asset yang bertambah ataupun menyusut.

Mitra binaan memiliki kendala dalam hal pembuatan pelaporan keuangan salah satunya juga kurangnya ilmu akuntansi yang mereka dapat dikarenakan hal tersebut tidak mereka aplikasikan secara baik dan benar apa yang diberikan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Rendahnya keinginan untuk memberdayakan serta faktor pendidikan yang kurang mendukung.

Pelaku usaha yang memiliki banyak keterbatasan seperti halnya keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan yang paling utama kesadaran dalam memberdayakan laporan keuangan yang kurang. Dengan pemberdayaan pelaporan keuangan usaha secara baik dan benar dan fokus dalam pembuatan secara periode maka memberikan manfaat yang besar bagi kelangsungan usaha mereka, karena

terlihat jelas usaha mendapatkan laba atau rugi, karena kebanyakan pelaku usaha tidak memberdyakannya secara konsisten.

B. Pembahasan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki suatu kewajiban kepada para mitra dalam hal memberikan pembinaan dan pelatihan. Dalam hal ini mitra binaan juga telah sepakat untuk memenuhi kewajiban yang ada pada surat perjanjian, salah satu hal yang diwajibkan dalam surat perjanjian tersebut yaitu para mitra membuat laporan keuangan mereka dari laba rugi, pengeluaran, pemasukkan, serta kewajiban-kewajiban. Akan tetapi para mitra banyak yang tidak memenuhinya dikarenakan bagi mereka laporan keuangan yang detail dan pembuatan yang lebih fokus membuat mereka menjadi terbatas . Salah satu nya dalam hal lemahnya sumber daya manusia para pelaku usaha, serta pemahaman dalam pelatihan dari PT. Perkebunan Nusantara III yang sulit dipahami bagi para pelaku usaha.

Faktor-faktor penyebab rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil menengah dapat dilihat dari cara para mitra membuat pembukuan atau pelaporan keuangan mereka, pada dasarnya pelaku usaha hanya membuat laporan usaha tidak detail, Usaha Kecil Menengah hanya membuat produk apa saja yang dibeli oleh pelanggan, jumlah produk, harga produk, adapun Usaha Kecil Menengah yang membuat di pelaporannya keuntungan dari setiap produk yang terjual.

Dari hal tersebut dapat dilihat kelemahan kemampuan pemahaman Usaha Kecil Menengah dalam pembuatan pembukuan atau pelaporan keuangan. Anggapan pelaku UKM dalam meningkatkan kinerja usahanya lebih

mengutamakan pengalaman dan komitmen dibandingkan membuat laporan keuangan sebagai bukti kinerja usahanya. Selain itu, disebabkan kemampuan menyusun laporan keuangan yang dimiliki pelaku UKM karena kurangnya pengetahuan akuntansi, pelatihan, tingkat pendidikan, serta pelaku UKM sering merangkap tugas dalam menjalankan usahanya, pelaku UKM kurang memperhatikan pengelolaan keuangan karena dampaknya menurut mereka tidak berpengaruh langsung terhadap kelangsungan usahanya, namun hal ini akan menimbulkan kekeliruan yang besar pada kinerja bila laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku karena kemampuannya masih rata-rata minim.

Hal ini bertentangan dengan teori menurut (Fahmi 2011 hal 28 dalam Riswan dan Yolanda 2014 hal 95) yang menyatakan bahwa laporan keuangan memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

Pelaku usaha atau mitra menganggap bahwa aplikasi program kemitraan yang mereka dapat dari PT. Perkebunan Nusantara III berupa pembinaan dan pelatihan sudah cukup bagus, akan tetapi untuk hal pelatihan seperti pembuatan laporan keuangan yang diwajibkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III tidak dapat terealisasi oleh pelaku usaha dengan konsisten, karena terbatasnya sumber daya manusia, serta pemahaman dalam hal pelaporan yang sulit dipahami.

Hal ini di dukung oleh teori (Kementerian Pendidikan, 2010, hal 9 dalam H Yenni R) Laporan keuangan merupakan suatu alat gambar kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu serta pertanggungjawaban pada manajemen serta yang terpenting secara mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan dapat membantu dalam menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha khususnya UKM. Sehingga untuk mencapai kinerja usaha secara berhasil salah satu cara adalah dengan melakukan penyimpanan catatan bisnis, pengelolaan keuangan.

Adapun pelatihan atau pembinaan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III yaitu memberi arahan dalam hal pemasaran dan pembuatan pelaporan keuangan.

Mitra binaan yang mendapatkan pinjaman dana dan menjadi mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara harus menggunakan dana tersebut untuk modal usaha, bukan untuk membeli aktiva seperti tanah, kendaraan, oleh karena itu pelaporan diwajibkan karena PT. Perkebunan tidak ingin dana tersebut disalah gunakan oleh

mitra. Karena tujuan PT. Perkebunan Nusantara III memberi dana adalah agar UKM dapat mengembangkan usaha mereka.

Salah satu cara untuk mencapai suatu perkembangan usaha yang baik adalah dengan melakukan penyimpanan catatan bisnis, pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit baik pembayaran maupun penagihan dari laporan keuangan, masalah yang terjadi adalah banyak pelaku Usaha Kecil Menengah mencatat jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan, jumlah barang yang terjual, tidak mengikuti pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya. Sehingga akan menyulitkan mereka serta bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan untuk menagih. Serta, dalam mengukur dan membuktikan perkembangan usaha yang mereka jalani setelah mendapat dana dari PT. Perkebunan Nusantara III sudah baik atau tidak.

Urutan penyusunan laporan keuangan harus dimulai dengan laporan laba atau rugi dan diakhiri dengan penyusunan laporan arus kas. Dengan pendekatan yang sederhana ini, setiap UKM yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan keuangan akan dapat dengan mudah menyusun laporan keuangannya secara periodik.

Laporan keuangan tidak hanya dapat diberdayakan pada perusahaan besar dengan sumber daya yang berlimpah, namun juga dapat diberdayakan pada UKM yang pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya. laporan keuangan, sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, dapat dipergunakan sebagai alat yang sangat bermanfaat bagi keputusan untuk pendirian suatu UKM maupun untuk penyusunan pola manual sebagai panduan kegiatan data keuangan sehari-hari dari keseluruhan yang terjadi pada usaha para UKM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan terhadap para pelaku Usaha Kecil Menengah berupa pembinaan, pelatihan, penyuluhan, dalam hal ini salah satu pelatihannya berupa cara pelaku usaha membuat pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh Program kemitraan, kewajiban tersebut tercantum didalam surat perjanjian. karena dari pelaporan keuangan usaha tersebut memudahkan PKBL dalam melihat aspek perkembangan usaha Mitra, serta lebih mudah dalam penagihan piutang kepada Mitra Binaan.

Sedangkan pelaku usaha kecil menengah memiliki keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan kemampuan dalam memahami pelaporan keuangan, karena menurut para pelaku usaha pelaporan keuangan memang penting sebagai patokan usaha tetapi sulit bagi mereka untuk membuat yang lebih rinci, maka pelaku usaha lebih memilih asumsi klasik dimana ketika penjualan mereka banyak pelanggan ataupun sedikit pada saat itulah mereka dapat berasumsi usaha mereka menghasilkan keuntungan atau tidak. Serta keterbatasan pembinaan dari Program Kemitraan Bina Lingkungan yang hanya memberikan binaan dari dana hibah, namun Program Kemitraan Bina Lingkungan selalu memberi binaan diluar dana hibah tersebut ketika mereka menagih utang kepada para mitra agar menjalankan semua perjanjian yang telah ditetapkan PKBL.

B. Saran

1. Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebaiknya melanjutkan pencatatan keuangan dan menyusun laporan keuangan yang telah di anjurkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
2. Pelaku Usaha kecil menengah (UKM) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebaiknya menerapkan siklus akuntansi untuk periode-periode berikutnya. Karena, dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan sehari-hari maka akan terlihat lebih akurat catatan biaya-biaya usaha yang detail, catatan besarnya jumlah penerimaan yang diperoleh dari transaksi, dapat mengetahui besar kecilnya laba yang diperoleh selama usaha berjalan, dapat meminimalisasi terjadinya ketidakcocokan dan kesalahan dalam perhitungan perolehan uang. Dan lebih pentingnya lagi dapat mengetahui secara detail omzet setelah di beri dana pinjaman dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
3. Dengan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pelaporan keuangan maka memudahkan UKM dalam pengelolaan keuangan dan meminjam dana kepada Bank ataupun koperasi.
4. Pelaku usaha hendaknya dapat lebih fokus dalam mengelola keuangan usahanya untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntansi freeline.blogspot.com. Diakses 12 Desember 2012.

Bagus Ardiyanto dan Achma Hendra Setiawan (2013). “*Analisis Bantuan Kredit dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dikota Semarang*’.Diponogoro Jurnal of Economics Vol.2 No.3 hal 1-13 ISSN (Online):2337-3814.

Bagus Ardiyanto dan Achma Hendra Setiawan (2013). “*Analisis Bantuan Kredit dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dikota Semarang*’. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponogoro. Dipublikasikan.

Drs. Hadri Mulya, M.Si (2013) . *Memahami Akuntansi Pasar : Pendekatan Teknis Siklus Akuntansi Edisi 3*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.

Elisabeth Penti Kurniawati,dkk. (2012). “ Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”*.JMK Vol.10 No.2 September 2012 hal 1-10.*

Hermon Adhy Putra dan Elisabeth Penti Kurniawati (2012). “*Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 14 Desember 2012 hal 547-580.

Hikmat,Hary (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

<https://www.KajianPustaka.com>. Diakses 12 desember 2017

Mardikanto Totok (2014), *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab (Koperasi)*. Bandung:Alfabeta.

Moch. Rochjadi Hafiluddin,dkk (2014). “*Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development” (Studi Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*”. Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol.17 No.2 ISSN 1411-0199 E-ISSN 2338-1884 hal 68-77.

- Najiati Sri,dkk (2005). "Pembedayaan Masyarakat dilahan Gambut Internasional". Bogor:Wetlands.
- Nor Hadi, (2011), Corporate Social Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Repository.umy.ac.id Pdf. Diakses 12 Desember 2017.
- Satori,dkk (2016), "*Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program CSR PT Indocement*".<http://www.syekhnurjati.ac.id>. Diakses 19 Desember 2017.
- Siti Nurlela (2014). "*Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM Kerajinan Gitar Di Kabupaten Suoharjo*". Jurnal Paradigma Vol.12 No.12 Agustus 2014-Januari 2015 ISSN:1693-0827 hal 50-59.
- Soemarso (2009), Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi 5 Buku 1, Jakarta:salemba Empat
- Tim Penyusunan (2009). Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan (Tidak dipublikasikan).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab V.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 " Usaha Kecil, Mikro, Menengah, pasal 1 ayat 8".
- Warsono, dkk (2010), " Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan". Yogyakarta: Asqard Chapter.
- Wibisono (2007). "*Prinsip-Prinsip Kemitraan*". www.rahmatullah.net. Diakses 12 Desember 2017.
- Yolanda Fatrecia Kesuma (2004), "*Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar dalam Penilaian Kinerja keuangan*". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Bnadar Lampung Vol.5 No.1 Maret 2014 hal 93-21.